



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 12 November 2024.
Waktu	: pukul 13.00 WIB s.d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025; 2. isu – isu Aktual.
Ketua Rapat	: H. Abdul Wachid
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 25 dari 41 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri Sosial beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid. dan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang serta didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., dan H. Anshori Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda pembahasan “**Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 dan Isu-isu Aktual**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan serapan anggaran tahun 2024 karena sampai tanggal 11 November 2024 baru terserap Rp59.948.315.469.462,- (*lima puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*) atau setara dengan 74,95 persen dari pagu anggaran Kemensos RI tahun 2024 sebesar Rp79.980.265.067.000,- (*tujuh puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI untuk mengimplementasikan program kerja dan anggaran Kemensos RI tahun 2025 sebesar Rp79.588.005.512.000,- (*tujuh puluh sembilan triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah*) sesuai dengan target dan anggaran program prioritas yang telah ditetapkan.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI agar menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Mendorong program perlindungan sosial sepanjang hayat dapat dioptimalkan sebagai jangkar perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
  - b. Memberikan kriteria yang jelas untuk kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem, miskin dan rentan sebagai dasar kebijakan Kementerian Sosial dalam mengentaskan kemiskinan.
  - c. Memastikan Kementerian Sosial dan jajaran pendamping sosial untuk bersikap netral pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024.
  - d. Meminta program bantuan sosial dimodifikasi dari pemberian yang bersifat cuma-cuma (*charity base*) menjadi pemberdayaan (*empowerement*).
  - e. Mendorong validasi dan digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan cara meningkatkan para pendamping sosial yang “melek IT” agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
  - f. Perlu sinergi antar Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah terkait program penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

- g. Mendorong Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) guna mempercepat pengentasan kemiskinan.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 17.05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**TTD**

**H. Abdul Wachid**